

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

- a. Pada April 2026 terjadi inflasi Year On Year (Y-On-Y) Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 2,62 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 110,89. Inflasi tertinggi terjadi di Waingapu sebesar 3,49 persen dengan IHK sebesar 112,91 dan inflasi terendah terjadi di Kabupaten Ngada sebesar 2,03 persen dengan IHK sebesar 110,38. Kota Kupang Month To Month (M-To-M) dan tingkat inflasi Year To Date (Y-To-D) pada bulan April 2026 masing-masing sebesar 0,09 persen dan 1,17 persen. April 2026 terjadi inflasi Year On Year (Y-On-Y) Kota Kupang sebesar 2,85 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 110,89. Kota Kupang pada April 2026 mengalami Inflasi YoY sebesar 2,85 persen lebih rendah dibandingkan pada Maret 2026 yaitu 2,87 persen, dan dibandingkan Inflasi YoY April 2025 yang sebesar 0.91 persen, Inflasi YoY April 2026 mengalami kenaikan. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya 7 indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 22,72 persen; kelompok transportasi sebesar 3,75 persen; kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,73 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,28 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,25 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,22 persen; serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,89 persen. Sementara itu terdapat 3 kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi, yaitu: kelompok pendidikan sebesar 5,25 persen; kelompok pakaian dan alas kaki 5,09 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,97 persen.
- b. Pada Mei 2026 terjadi inflasi Year On Year (Y-On-Y) Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 2,76 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 110,60. Inflasi tertinggi terjadi di Waingapu sebesar 3,71 persen dengan IHK sebesar 112,64 dan inflasi terendah terjadi di Kabupaten Timor Tengah Selatan sebesar 0,95 persen dengan IHK sebesar 110,82. Kota Kupang Month To Month (M-To-M) dan tingkat inflasi Year To Date (Y-To-D) pada bulan Mei 2026 masing-masing sebesar 0,02 persen dan 1,18 persen. Mei 2026 terjadi inflasi Year On Year (Y-On-Y) Kota Kupang sebesar 3,43 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 110,22. Kota Kupang pada Mei 2026 mengalami Inflasi YoY sebesar 3,43 persen lebih tinggi dibandingkan pada April 2026 yaitu 2,85 persen, dan dibandingkan Inflasi YoY Mei 2025 yang sebesar 0.71 persen, Inflasi YoY Mei 2026 mengalami kenaikan. indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 21,29 persen; kelompok transportasi sebesar 4,13 persen; kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 3,13 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,05 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,99 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,54 persen; serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,57 persen. Sementara itu terdapat 3 kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi, yaitu: kelompok pendidikan sebesar 5,25 persen; kelompok pakaian dan alas kaki 4,67 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,73 persen.
- c. Pada Juni 2026 terjadi inflasi Year On Year (Y-On-Y) Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 3,56 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 111,34. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Kupang sebesar 4,02 persen dengan IHK sebesar 110,88 dan inflasi terendah terjadi di Kabupaten Timor Tengah Selatan sebesar 2,80 persen dengan IHK sebesar 111,79. Kota Kupang Month To Month (M-To-M) dan tingkat inflasi Year To

Date (Y-To-D) pada bulan Juni 2026 masing-masing sebesar 0,60 persen dan 1,79 persen. Juni 2026 terjadi inflasi Year On Year (Y-On-Y) Kota Kupang sebesar 4,02 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 110,88. Kota Kupang pada Juni 2026 mengalami Inflasi YoY sebesar 4,02 persen lebih tinggi dibandingkan pada Mei 2026 yaitu 3,43 persen, dan dibandingkan Inflasi YoY Juni 2025 yang sebesar 0.53 persen, Inflasi YoY Juni 2026 mengalami kenaikan. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya 8 indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 20,10 persen; kelompok transportasi sebesar 4,75 persen; kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 4,42 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,51 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,02 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,46 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 1,42 persen; kelompok perlengkapan, peralatan serta pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,05 persen. Sementara itu terdapat 3 kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi, yaitu: kelompok pendidikan sebesar 5,25 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 4,27 persen; serta kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,65 persen.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

- a. Rendahnya konektivitas jaringan distribusi transportasi Rendahnya konektivitas yang dimaksud adalah permasalahan konektivitas terutama dihadapi oleh Kabupaten di pulau Timor, Flores dan Sumba yang memiliki tingkat ketergantungan pasokan antar daerah yang cukup tinggi.
- b. Kesenjangan informasi. Kesenjangan informasi atau assymmetric information antar pelaku di tengah panjangnya rantai distribusi menyebabkan tidak efisiennya harga di
- c. Distorsi struktur pasar. Distorsi struktur pasar ditimbulkan akibat adanya beberapa komoditas strategis yang terdistorsi menyebabkan adanya kekakuan dalam perilaku pembentukan harga.
- d. Produktivitas pangan. Kondisi iklim dan cuaca yang cenderung panas hampir di seluruh daerah di Provinsi NTT menjadikan lahan di Provinsi NTT bersifat kering dan tandus, sehingga sangat mempengaruhi kesuburan tanah dan produktifitas.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Keterjangkauan harga
2. Ketersediaan pasokan
 - a. Tim Teknis TPID Kota Kupang dari Bagian Perekonomian Setda Kota Kupang pada bulan Januari s/d Juni 2026 telah melakukan pemantauan harga di Pasar Oebobo, Pasar Kasih dan Pasar Oeba terkait Komoditas penyumbang inflasi diantaranya yaitu daging sapi, cabe biasa, ikan tuna, tomat, bawang merah, bawang putih, kacang tanah dan ikan kembung. Kegiatan ini akan rutin dilaksanakan pada setiap bulannya sampai dengan akhir Tahun 2026.
 - b.
 1. Kelancaran distribusi
 2. Komunikasi yang efektif

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam program yang telah dituliskan dalam peta jalan (Roadmap) pengendalian inflasi di daerah, sebagai evaluasi atas kebijakan yang telah ditetapkan, Pemerintah Kota Kupang secara rutin setiap bulannya melaksanakan kegiatan Rapat Teknis dan Rapat Koordinasi TPID, melaksanakan kegiatan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (HLM TPID) Kota Kupang pada setiap triwulan serta melaksanakan tindak lanjut atas rapat HLM TPID yang telah dilaksanakan.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1) Melaksanakan Operasi Pasar Murah (OPM) atau Gerakan Pangan Murah (GPM):

Dinas PERINDAG Kota Kupang berkoordinasi dengan mitra kerja terkait untuk melaksanakan OPM atau GPM secara intensif pada Maret hingga April guna menekan potensi kenaikan harga menjelang HKBN Hari Raya Nyepi, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Paskah Tahun 2026.

2) Melaksanakan sidak dan himbauan belanja bijak:

1. Dinas PERINDAG Kota Kupang dan Bagian Perekonomian melaksanakan sidak ke Pasar dan Distributor.
2. Dinas Ketahanan Pangan menggiatkan himbauan belanja bijak untuk mengarahkan masyarakat agar belanja secara rasional.

3) Mendorong produksi dan diversifikasi pangan:

1. Dinas Pertanian dan Dinas PERINDAG Kota Kupang melakukan percepatan pengembangan sentra produksi lokal untuk menekan ketergantungan pasokan dari luar wilayah.
2. Dinas Pertanian Kota Kupang mendorong Gerakan Pekarangan Pangan Lestari untuk meningkatkan kemandirian pangan masyarakat.
3. Dinas PERINDAG Kota Kupang memperkuat peran *offtaker* pangan agar hasil panen petani dapat terserap optimal.
4. Dinas Ketahanan Pangan mendorong diversifikasi pangan untuk mengarahkan masyarakat agar belanja secara rasional dan tidak berfokus pada komoditas tertentu.

4) Dukungan Transportasi dari APBD:

Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) dengan skema subsidi Transportasi dari APBD.

5) Merealisasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk pengendalian inflasi:

Dinas PERINDAG Kota Kupang melaksanakan Pasar Murah Bersubsidi dengan sumber dana dari Belanja Tidak Terduga (BTT) pengendalian inflasi.

6) Kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan:

Bagian Kerjasama Setda Kota Kupang dan OPD Teknis Anggota TPID Kota Kupang melaksanakan kerja sama dan sinergi dengan daerah produsen (penghasil komoditi) dan daerah konsumen untuk kelancaran pasokan.